



OPTIMALISASI TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI INTEGRASI MANAJEMEN ASET BERBASIS KODEFIKASI DIGITAL DI DESA PINANG, KABUPATEN ENREKANG

Oleh

Ade Ikhlas Amal Alam¹, Muhammad Fauzan Garantjang², Audrey Michelle Wenny Yolanda³, Nur Hazimah Alimuddin⁴, Yusrifah Adwiah Adnan⁵, A. Nurhaliza Magfirah N.⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

E-mail: ¹adeikhlas@unhas.ac.id, ²fauzangarantjang@unhas.ac.id,

³audreyyolanda@unhas.ac.id, ⁴nurhazimahalimuddin@unhas.ac.id,

⁵adnanya23a@student.unhas.ac.id, ⁶nanm23a@student.unhas.ac.id

Article History:

Received: 23-07-2026

Revised: 19-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keywords:

Village Financial Management, Village Accountability, Village Asset Management, Digital Codification, SISKEUDES, Asset Digitization, Enrekang Regency.

Abstract: This Community Service Program was carried out in collaboration with Pinang Village, focusing on optimizing village financial governance and accountability through the integration of asset management based on digital codification. The main challenges faced by the partner included low accountability in village financial management, non-standardized asset management, minimal use of information technology, limited capacity of village officials, and the lack of integration between the village's digital financial and asset systems. The proposed solutions include the development of a digital-based village asset codification system; training and technical assistance in village financial and asset management; the implementation of integrated village financial and asset systems; the development of standard operating procedures (SOPs) for financial and asset management; and program monitoring and evaluation. The implementation method is participatory, involving the following stages: outreach, training, technical assistance, system implementation, and evaluation of program sustainability. The targeted outcomes include SINTA-indexed scientific publications, publications in online media/repositories, the development of SOPs for village financial and asset management, capacity building for village officials in the use of digital systems, and the implementation of a digital codification-based asset management system that supports transparency and accountability in village financial governance.

PENDAHULUAN

Kabupaten Enrekang merupakan wilayah agraris di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi desa cukup besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha ekonomi lokal, sehingga alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa di kabupaten ini terus meningkat setiap tahun sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal dan



penguatan otonomi desa. Peningkatan alokasi dana desa tersebut menuntut penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, namun berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di banyak wilayah Indonesia masih rentan terhadap persoalan administrasi, lemahnya pengendalian internal, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola sistem keuangan berbasis teknologi informasi (Aziiz dan Prastiti, 2019). Pengelolaan aset desa yang belum terdokumentasi secara sistematis turut memperbesar risiko ketidaksesuaian data aset, rendahnya kualitas laporan keuangan, dan meningkatnya potensi penyalahgunaan aset desa (Purnama dkk., 2026).

Desa Pinang di Kabupaten Enrekang, sebagai salah satu desa yang terus berkembang melalui dukungan dana desa dan program pembangunan berbasis masyarakat, tidak luput dari persoalan tersebut; pencatatan aset desa masih dilakukan secara konvensional dan belum menggunakan kodifikasi digital yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan desa, sehingga proses identifikasi, monitoring, inventarisasi, dan penyusunan laporan aset belum berjalan optimal. Padahal, penerapan sistem digital seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah terbukti mampu meningkatkan transparansi, kualitas pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa apabila diimplementasikan secara optimal dan didukung kapasitas aparatur yang memadai (Kesa dkk., 2024), sekaligus memperkuat pengawasan internal dan meminimalisasi potensi fraud dalam pengelolaan keuangan dan aset desa (Said & Wisnaeni, 2021). Kenyataannya, implementasi sistem digital di tingkat desa masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum terintegrasinya data aset dengan laporan keuangan desa, serta minimnya pemanfaatan teknologi berbasis kodifikasi digital dalam manajemen aset (Diyanto & Musfi, 2022).

Berangkat dari kesenjangan antara kebutuhan tata kelola desa yang akuntabel dan kondisi eksisting yang masih parsial dan konvensional tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Pinang, Kabupaten Enrekang, melalui pengembangan dan penerapan sistem kodifikasi digital untuk manajemen aset yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan aset dan keuangan berbasis digital, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan Pemerintah Desa Pinang, Kabupaten Enrekang, sebagai mitra utama. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil desa, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) aparatur desa terhadap sistem yang dikembangkan, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin setelah masa pendampingan berakhir.

Pelaksanaan program diawali dengan tahap koordinasi dan identifikasi masalah, di mana tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan, wawancara terstruktur, serta penelusuran



dokumen keuangan dan inventaris aset desa untuk memetakan kondisi awal tata kelola keuangan dan pengelolaan aset. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan materi dan strategi intervensi yang akan diberikan. Tahap berikutnya adalah sosialisasi program kepada aparatur desa dan perangkat terkait, yang dilakukan secara edukatif dan partisipatif melalui presentasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman awal mengenai urgensi digitalisasi tata kelola keuangan dan aset desa. Bahasa yang digunakan dalam seluruh kegiatan penyuluhan dan pendampingan adalah Bahasa Indonesia yang komunikatif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman aparatur desa, dengan penyederhanaan istilah-istilah teknis akuntansi dan teknologi informasi agar mudah dicerna oleh peserta yang berlatar belakang non-akuntansi.

Selanjutnya, dilaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada capacity building, mencakup materi akuntansi sektor publik, penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi pemerintahan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelatihan ini dilengkapi dengan modul cetak dan digital sebagai alat bantu (tools) pembelajaran, serta didukung perangkat komputer dan proyektor untuk simulasi praktik langsung. Rangkaian pelatihan dilanjutkan dengan pelatihan kodefikasi aset desa, yang menggunakan pendekatan teknologi dan pelatihan praktis berupa penomoran dan pengklasifikasian aset berdasarkan kategori, lokasi, dan tahun perolehan menggunakan sistem kodefikasi digital yang dirancang khusus oleh tim pengabdian. Dalam tahap ini, peserta dilatih menggunakan aplikasi berbasis spreadsheet dan/atau sistem informasi sederhana yang terintegrasi dengan basis data aset, sehingga setiap unit aset memiliki kode identitas unik yang memudahkan pelacakan, pemeliharaan, dan pelaporan.

Seluruh tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berurutan, mulai dari koordinasi awal hingga penyusunan pendampingan dengan melibatkan partisipasi aktif mitra pada setiap tahap, baik dalam bentuk penyediaan data, keikutsertaan dalam pelatihan, maupun pemberian umpan balik, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar bersifat kolaboratif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Desa Pinang, Kabupaten Enrekang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, serta implementasi manajemen aset berbasis kodefikasi digital. Ketiga tahapan tersebut dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar yang telah diidentifikasi pada tahap analisis situasi, yaitu belum tertibnya administrasi aset desa serta lemahnya keterpaduan antara pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan praktik administrasi aparatur desa, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

1. Sosialisasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Tahap awal kegiatan berupa sosialisasi kepada aparatur Desa Pinang mengenai keterkaitan antara pengelolaan aset dan tata kelola keuangan desa. Materi sosialisasi disusun secara bertahap, dimulai dari urgensi inventarisasi aset, konsep dan tujuan kodefikasi aset,



hingga prinsip dasar akuntabilitas keuangan desa (Gambar 1). Pendekatan ini penting mengingat berbagai kajian menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa banyak dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia dan sistem administrasi yang belum memadai (Aziiz & Prastiti, 2019). Dengan demikian, penguatan pemahaman aparatur menjadi prasyarat penting sebelum masuk pada tahap teknis implementasi sistem.

Selain aspek konseptual, sosialisasi juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai instrumen pendukung transparansi. Hal ini relevan dengan hasil evaluasi terhadap sistem informasi keuangan desa yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi pelaporan keuangan desa apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai (Kesa dkk., 2024). Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membangun kesiapan mental dan teknis aparatur desa dalam menerima perubahan sistem administrasi menuju digitalisasi.



Gambar 1. Sosialisasi optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa. Ade Ikhlash Amal Alam, S.E., MSA. dan Muhammad Fauzan Garantjang, S.E., M.AK., AK., ACPA, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin memaparkan materi optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Pinang, Kab Enrekang.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Tahap kedua kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup identifikasi aset, klasifikasi berdasarkan jenis dan fungsi, serta penyusunan kodefikasi aset desa. Melalui diskusi interaktif, aparatur desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan pertanyaan terkait pencatatan serta pengelolaan aset yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur mengenai pentingnya kodefikasi dan pencatatan aset yang sistematis. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset (Gambar 2). Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran bahwa tertib administrasi aset berperan dalam mendukung kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan Kesa dkk. (2024) yang menekankan pentingnya pemahaman dan keterlibatan aktif pengguna dalam penerapan sistem informasi keuangan desa.

Selain itu, pendampingan juga memperkenalkan penggunaan database inventaris berbasis digital sederhana. Pengenalan ini diharapkan dapat membantu aparatur beralih dari pencatatan manual menuju pengelolaan data aset yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.



Gambar 2. Pendampingan pengelolaan aset. Aparatur desa mendiskusikan bagaimana praktik pencatatan aset dan pelaporan keuangan desa.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang telah berhasil menjawab tujuan yang dicanangkan, yaitu mengoptimalkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa melalui integrasi manajemen aset berbasis kodefikasi digital. Rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan implementasi sistem kodefikasi digital terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur Desa Pinang dalam mengelola aset desa secara tertib, sistematis, dan terintegrasi dengan administrasi keuangan.

Capaian utama program ini tercermin dari aparatur desa yang kini memiliki pemahaman konseptual mengenai kodefikasi aset serta kemampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen pendukung administrasi pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kodefikasi digital bukan sekadar solusi administratif jangka pendek, melainkan fondasi bagi terciptanya tata kelola aset dan keuangan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Pinang serta perbaikan sistem administrasi aset desa. Meskipun penerapan sistem masih memerlukan penyempurnaan secara bertahap, hasil yang dicapai mengindikasikan bahwa integrasi manajemen aset berbasis kodefikasi digital berpotensi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model rujukan bagi pengembangan pengelolaan aset dan keuangan desa berbasis digital ke depannya.

SARAN

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian merencanakan beberapa langkah lanjutan. Pendampingan kepada aparatur Desa Pinang akan terus dilakukan agar sistem kodefikasi digital yang telah diperkenalkan dapat dimanfaatkan secara konsisten dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan aset dan keuangan desa secara berkelanjutan. Database aset desa yang telah disusun juga akan terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk adanya penambahan, pengurangan, atau perubahan kondisi aset, sehingga data yang dihasilkan tetap lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, integrasi antara database aset dengan administrasi keuangan desa akan diperkuat agar informasi aset dapat mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan secara lebih efektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas tata



kelola keuangan desa semakin meningkat. Pemerintah Desa Pinang diharapkan terus memperbarui database aset secara berkala serta menerapkan sistem kodefikasi digital secara konsisten dalam setiap proses inventarisasi dan pencatatan aset. Kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa juga perlu terus dijalin melalui kegiatan pendampingan lanjutan guna memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset dan keuangan berbasis digital. Ke depan, hasil pelaksanaan program ini akan disusun dan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi replikasi program serupa di desa-desa lain sehingga manfaat digitalisasi tata kelola aset dan keuangan desa dapat dirasakan secara lebih luas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas dukungannya dalam mendanai Program Internal Peningkatan Kinerja Utama (KIPKU). Tanpa bantuan dan kepercayaan yang diberikan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini tidak akan dapat berjalan dengan sukses.

DAFTAR REFERENSI

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>

Diyanto, V., & Musfi, P. N. (2022). Digitalization of Financial Reports of Village-Owned Enterprises. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(3), 205–210. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.205-210>

Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C. W. (2024). Evaluation of The Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency. *Khazanah Sosial*, 6(3). <https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.38933>

Purnama, Y. I., Junaidi, & Mahsun, M. (2026). Risk Mitigation in Village Financial and Asset Management: Evidence from Boyolali Regency. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4029>

Said, N., & Wisnaeni, F. (2021). Corruption Criminal Prevention Strategy Financial Management of Village Funds Through TP4D in Semarang District. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(5). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-28>